

Alasan mendasar mengapa Al-Qur'an menetapkan ancaman yang begitu keras terhadap riba adalah bahwa Islam hendak menegakkan suatu sistem ekonomi di mana semua bentuk eksploitasi dihapuskan.

Dan sistem keuangan berbasis riba yang dipinjam oleh negara-negara muslim dari negara-negara kapitalis merupakan salah satu sumber utama konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Karena itu, sekiranya seluruh kebijakan yang diambil oleh Umar diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik, belum tentu akan berhasil mewujudkan tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan, kecuali jika seluruh sistem keuangan direstrukturisasi menurut ajaran-ajaran Islam.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara filosofis, ada dua hal yang menjadi landasan Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola keuangan publik, yaitu mengedepankan maslahat syari'at dan menerapkan gaya hidup sederhana. Sedangkan kebijakan yang diambil adalah mengembalikan zakat sebagai institusi utama pendapatan negara, optimalisasi pendapatan kharaj, penetapan jizyah yang relatif tinggi, kebijakan perpajakan yang adil, pemberantasan korupsi dan nepotisme, serta mengadakan gerakan penghematan, efisiensi dan pemangkasan birokrasi. Sumber pendapatan negara pada masa ini adalah zakat, kharaj, seperlima harta rampasan perang, dan *fai'*, jiztah, pajak dan lain-lain. Pemerintah Umar bin Abdul Aziz mengalokasikan pendapatan negaranya pada beberapa pos belanja publik berikut: kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas utama, pendidikan. gaji pegawai, pertahanan dan militer serta pembangunan Infrastruktur
Kkhalifah Umar mengambil beberapa langkah kebijakan untuk mengamankan defisit anggaran yang dikhawatirkan terjadi, yaitu reformasi bidang perdagangan, reformasi bidang pertanian, penghematan kas Baitul Mal, dan jaminan keamanan.
2. Dengan langkah dan kebijakan yang diambil, khalifah mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, menciptakan surplus anggaran negara, meminimalkan angka kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja penuh.. Secara historis, banyak ahli sejarah dan ulama yang merekam kesejahteraan rakyat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Surplus anggaran ditandai dengan kebijakan khalifah yang 'royal' terkait belanja publik. Minimnya angka kemiskinan ditandai dengan tidak adanya orang yang bersedia menerima zakat. Sedangkan kesempatan kerja penuh adalah dampak dari kebijakan optimalisasi zakat, distribusi zakat berdampak pada peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

3. Sudah saatnya negara muslim modern kembali kepada Islam dan menjadikannya sebagai falsafah dalam semua kebijakannya, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pola hidup sederhana sangat perlu untuk diterapkan oleh jajaran pemerintah negara muslim modern. Selama ini terlihat bahwa banyak anggaran negara yang dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa dikurangi, misalnya anggaran untuk pakaian pejabat, akomodasi, kunjungan, yang nilainya sangat mencengangkan. Padahal di sisi lain masih banyak rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya Pajak-pajak yang menjadi sumber pendapatan negara Islam awal sudah tidak berlaku lagi saat ini, karena itu perlu melengkapi sistem pajak modern yang mengakui perubahan realitas. Tidakkah mungkin memenuhi kebutuhan infrastruktur fisik dan sosial yang begitu besar dari sebuah perekonomian modern yang efisien dan berkembang tanpa adanya pendapatan dari pajak yang memadai. Tidak ada yang memungkiri dampak buruk korupsi dan nepotisme. Tidak ada satu masyarakat yang mampu mempertahankan momentum pembangunannya jika kualitas pemerintahannya merosot Gerakan efisiensi juga sudah saatnya dicanangkan, mengingat masih banyaknya tanggung jawab negara yang masih belum terselesaikan, khususnya terkait permasalahan kesejahteraan rakyat, Kebijakan Umar yang mereformasi bidang pertanian juga relevan untuk diterapkan masa sekarang. Sebagian penduduk di banyak negara muslim mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan umum. Namun, suatu konstalasi dari kekuasaan-kekuasaan politik dan sejarah telah mengakibatkan suatu struktur sosioekonomi yang secara inheren tidak adil dan cenderung menimpakan penindasan dan petaka bagi penduduk desa. Ada satu prasyarat yang mesti dipenuhi oleh negara-negara muslim, yaitu menghapuskan riba. Semua kebijakan di atas, terutama optimalisasi zakat, tidak akan menemukan hasil yang maksimal bila ekonomi berbasis riba masih diberlakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan, penulis mengajukan beberapa saran untuk pengambil kebijakan dan akademisi, yaitu :

1. Untuk Pengambil Kebijakan

- a. Pemerintah negara muslim harus mengembalikan zakat sebagai institusi pendapatan negara. Zakat sangat potensial menjadi sumber pendapatan negara, sebab ia adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Pemerintah negara muslim harus membentuk lembaga atau kementerian yang khusus menangani zakat, mengingat zakat telah memiliki pos pengeluaran tersendiri yang telah ditentukan oleh syari'at.
- b. Mengingat pajak-pajak yang menjadi sumber pendapatan negara Islam awal sudah tidak berlaku lagi saat ini, maka pemerintah negara muslim perlu melengkapi sistem pajak modern yang mengakui perubahan realitas, tentu dengan merujuk kepada spirit Islam.. Tidaklah mungkin memenuhi kebutuhan infrastruktur fisik dan sosial yang begitu besar dari sebuah perekonomian modern yang efisien dan berkembang tanpa adanya pendapatan dari pajak yang memadai.
- c. Korupsi telah merebak di negara-negara muslim, meskipun sebenarnya hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Karena itu pemerintah negara muslim harus serius memberantas korupsi. pemberantasan korupsi, harus ada ketegasan hukuman untuk setiap bentuk penyelewengan keuangan.
- d. Mengingat masih banyak penduduk di negara muslim yang mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan umum, maka pemerintah perlu melakukan reformasi pertanian. Pembangunan pedesaan sudah waktunya digalakkan.
- e. Ada satu prasyarat yang mesti dipenuhi oleh negara-negara muslim, yaitu menghapuskan riba. Semua kebijakan di atas, terutama optimalisasi zakat, tidak akan menemukan hasil yang

maksimal bila ekonomi berbasis riba masih diberlakukan. Karena itu, pemerintah negara muslim harus mengembalikan sistem perekonomian bebas riba (bunga). Sudah sangat jelas dampak buruk riba bagi perekonomian. Riba mengakibatkan konsentrasi kekayaan dan menyebabkan kesenjangan pendapatan.

2. Untuk akademisi:

- a. Diharapkan adanya penelitian yang serius dan komprehensif mengenai penerapan zakat dalam sistem keuangan publik modern. mengingat zakat sangat potensial sebagai sumber pendapatan negara muslim modern, untuk kemudian dialokasikan pada kesejahteraan masyarakat muslim, dan memang itulah fungsi utama zakat.
- b. Diharapkan adanya penelitian yang mendalam terkait pajak; bagaimana penerapan pajak yang sesuai syari'at dalam konteks keuangan publik modern, sejauh mana hak pemerintah dalam memungut pajak, pajak apa saja yang boleh dipungut oleh negara muslim modern? Mengingat dalam perekonomian modern seperti ini tidak ada alasan lagi untuk melarang pemungutan pajak selain zakat, dan sebagian besar ulamapun berpendapat dibolehkannya pemungutan pajak selain zakat.

DAFTAR PUSTAKA